



UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI KESENJANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT DENGAN REDISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

GOVERNMENT EFFORTS TO OVERCOME ECONOMIC INEQUALITIES IN SOCIETY BY REDISTRIBUTING NATIONAL INCOME

Almas Ressel Ulia¹, Salahudin Rayyan², Etty Ratnawati³

^{1,2,3}Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN SSC Syekh Nurjati Cirebon

Email: almasressul45@gmail.com¹, Salahudinrayyan123@gmail.com², ettyratnawati@syekhnurjati.ac.id³

Article history :

Received : 24-12-2024

Revised : 25-12-2024

Accepted: 27-12-2024

Published:30-12-2024

Abstract

The widening economic gap has become a critical issue in many countries, including Indonesia. Significant income inequality can trigger various social problems such as poverty, political instability, and a decline in the quality of life. This study aims to analyze the government's efforts in addressing economic inequality through national income redistribution policies. This study uses a library research method to examine various literature, research reports, and statistical data related to income redistribution policies that have been and are being implemented. The research results show that the government has made various efforts to redistribute income, such as implementing progressive taxes, providing subsidies, and social assistance programs, and increasing access to public services. However, the effectiveness of these policies still needs to be improved. The main challenges faced in implementing income redistribution policies include limited state resources, the complexity of socio-economic problems, and a lack of coordination among government agencies. This study concludes that income redistribution policies are important in addressing economic inequality. However, a more comprehensive and sustainable approach is needed to achieve optimal results. In addition, the active participation of all stakeholders, including the government, private sector, and the community, is essential to create a more just and prosperous society

Keywords: *economic inequality, income redistribution, government policies*

Abstrak

Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar menjadi isu krusial di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan dapat memicu berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan redistribusi pendapatan nasional. Dengan menggunakan metode library research, penelitian ini mengkaji berbagai literatur, laporan penelitian, dan data statistik terkait kebijakan redistribusi pendapatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meredistribusi pendapatan, seperti penerapan pajak progresif, pemberian subsidi, program bantuan sosial, dan peningkatan akses terhadap layanan publik. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan. Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan redistribusi pendapatan antara lain adalah terbatasnya sumber daya negara, kompleksitas masalah sosial ekonomi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan redistribusi pendapatan merupakan langkah penting dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Namun, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kata Kunci : *kesenjangan ekonomi, redistribusi pendapatan, kebijakan pemerintah*



PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi yang semakin menganga menjadi isu yang krusial yang mendominasi diskursus pembangunan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia ketimpangan distribusi pendapatan yang signifikan tidak hanya mengancam stabilitas sosial-politik, namun juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Fenomena ini semakin diperparah oleh globalisasi, liberalisasi ekonomi dan perubahan teknologi yang cenderung memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin.

Dalam konteks tersebut, upaya pemerintah untuk meredistribusikan pendapatan nasional menjadi semakin mendesak. Kebijakan redistribusi pendapatan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang lebih adil dan setara. Namun, implementasi kebijakan redistribusi seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti terbatasnya sumber daya negara, kompleksitas masalah sosial ekonomi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah.

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan. Studi-studi sebelumnya umumnya menyoroti pentingnya peran negara dalam meredistribusikan pendapatan melalui mekanisme pajak, transfer tunai dan penyediaan layanan publik. Namun, hasil penelitian tersebut seringkali beragam dan konteks spesifik.

Berdasarkan hasil kajian pustaka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan redistribusi pendapatan di [negara/wilayah kajian]. Secara khusus, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1). Kebijakan redistribusi pendapatan apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah? 2). Seberapa efektifkah kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengurangi ketimpangan pendapatan? 3). Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan redistribusi pendapatan? 4). Tantangan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan redistribusi pendapatan? 5). Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami kompleksitas masalah kesenjangan ekonomi dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi pustaka. Menurut Sugiyono, studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi pustaka atau studi literatur dilakukan oleh peneliti setelah menentukan topik penelitian dan menetapkan rumusan masalah sebelum terjun kelapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Studi pustaka lebih banyak mengumpulkan sumber data dari perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Adapun jenis-jenis sumber data yang dapat diambil sebagai referensi dari studi pustaka adalah buku, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, narasumber dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kajian yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Ketimpangan Pendapatan

Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh Indonesia. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan



cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah. Perhitungan ketimpangan pendapatan yang sangat populer digunakan oleh para ekonom adalah Indeks Rasio Gini, karena perhitungan ini cukup untuk menjelaskan hubungan antara kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi dengan kelompok penduduk lainnya.

Ketimpangan pendapatan antar pulau di Indonesia rata rata masuk dalam kategori jenis ketimpangan sedang yang diukur dari Rasio Gini. Dari pencapaian pertumbuhan ekonomi sampai saat ini, Pulau Jawa memberikan kontribusi paling besar diantara pulau lainnya yakni mencapai 58,75 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat urbanisasi perpindahan penduduk ke kota besar akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan di pedesaan, namun perpindahan penduduk tersebut tidak diimbangi dengan keahlian atau kemampuan yang memadai sehingga menjadikan sumber daya manusia yang dimiliki pun rendah, oleh sebab itu akan berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi dan berakibat pada kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan setidaknya didorong oleh beberapa faktor diantara-Nya yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal, dan lain-lain. (Ibnurrasyad, 2014). Tingkat pengangguran yang ada pada suatu wilayah dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Semakin besar tingkat pengangguran di suatu daerah berarti menurunkan tingkat produktivitas dan akan memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, sementara wilayah lain terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan (Yusica, 2018). Adanya perbedaan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) akan menimbulkan permasalahan ketimpangan pendapatan (Ermatry, 2019). Penelitian lainnya yang dilakukan Hariani 2019 yang berjudul Analisis faktor faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, dengan hasil penelitian Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan positif sedangkan Pengangguran tidak signifikan. Penelitian Reza (2018) yang berjudul analisis faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia memiliki hasil signifikan negatif pada variabel Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia.

Teori Pengangguran

Menurut teori Malthus mengatakan bahwa pada masyarakat modern dapat diartikan semakin pesatnya jumlah penduduk menghasilkan angkatan kerja yang semakin banyak, namun tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada karena jumlah kesempatan kerja semakin sedikit kemudian antar individu satu dengan yang lain saling bersaing untuk memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan akan menjadi golongan penganggur. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang memengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat

Teori Produk Domestik Regional Bruto

Menurut teori Nurkse kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Hak-hak dasar antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan; kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan; rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan; hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial

Teori Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Mankiw, modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan. Menurut mengatakan bahwa pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk



mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus dicapai untuk mencapai sasaran tersebut. Untuk mengukur dimensi Kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur Pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Kebijakan Dalam Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendistribusikan pendapatan milik masyarakat berkecukupan untuk kurang mampu. Alasan dilakukannya kebijakan redistribusi pendapatan adalah demi mengatasi permasalahan terkait kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Secara garis besar, redistribusi pendapatan dapat diartikan sebagai upaya untuk pendistribusian kembali pendapatan yang diterima di Masyarakat dari kalangan mampu kepada Masyarakat lainnya yang berasal dari kalangan kurang mampu sehingga redistribusi ini terbagi menjadi 2 macam yaitu redistribusi horizontal dan redistribusi vertikal. Redistribusi pendapatan horizontal lebih mengacu pada bentuk penyaluran uang antar kelompok maupun pribadi. Dengan kata lain peredistribusi ini sifatnya dalam lingkungan kecil atau ruang lingkup yang lebih kecil. Adapun fungsinya redistribusi horizontal ini, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya dari golongan ekonomi lemah sehingga memiliki taraf kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, Redistribusi pendapatan vertikal merujuk pada penyaluran uang dari golongan Masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian Masyarakat dari kalangan ekonomi kuat kepada Masyarakat ekonomi lemah. Tujuan Redistribusi menurut Ramlan Surbakti dalam buku memahami ilmu politik: 1992, dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaannya adalah Memberikan jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk serta mengurangi adanya kesenjangan pendapatan yang terjadi di dalam kehidupan Masyarakat. Selain itu, redistribusi pendapat juga bermanfaat untuk mengurangi kondisi perekonomian Masyarakat yang kurang merata sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara umum.

Tingkat pendapatan sering menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Namun, meningkatnya pendapatan belum tentu menjamin kesejahteraan Masyarakat karena perbedaan dalam tingkat pendapatan antarindividu. Sumber pendapatan yang didapat bukan hanya akibat peran pemerintah namun ada peran pihak ketiga dalam hal ini para pelaku usaha atau perusahaan yang bisa menjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat

Menurut Muhammad Rapii, M.Pd., dkk, dalam bukunya yang berjudul “Perekonomian Indonesia” menjelaskan bahwa redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakatnya. Perlindungan ini bukan hanya pengeluaran anggaran publik yang tidak berguna, melainkan sebuah investasi sosial yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan cara meredistribusi pendapatan.

Program redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah yaitu penarikan pajak. Artinya, sebagian dari pendapatan masyarakat akan dimobilisasi oleh negara untuk digunakan dalam membiayai pembangunan yang dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya dirasakan oleh para pembayar pajak saja. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang didalam UU tersebut menjelaskan bahwa UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.



Kebijakan redistribusi pajak memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikenakan pada golongan yang lebih tinggi kemudian didistribusikan kepada golongan yang lebih rendah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, dana yang didapat dari kebijakan pajak tersebut bisa dialokasikan untuk program-program sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau bantuan sosial lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat. Namun dampak kebijakan redistribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada implementasi yang tepat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus dari pemerintah karena memiliki peran penting dalam perekonomian global dan lokal. UMKM muncul atas respons terhadap berbagai permasalahan ekonomi, dan sosial. Selain itu UMKM menjadi alternatif untuk menciptakan lapangan kerja dan mandiri secara ekonomi. Namun, masyarakat mengalami kesulitan, terutama dalam aspek modal dan keuangan saat membangun UMKM.

Program Dana Penguatan Modal menjadi solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Program DPM merupakan sumber pendanaan yang diberikan kepada masyarakat sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya program Dana Penguatan Modal dari pemerintah, permasalahan dasar yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh sumber modal dapat terselesaikan.

Pengentasan kemiskinan tetaplah menjadi salah satu program prioritas dan strategi lintas bidang di Indonesia saat ini. Pemerintah mempunyai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang salah satu program tersebut bernama “Program Keluarga Harapan (PKH)”. program ini didesain bukan hanya untuk memastikan standar hidup keluarga rumah tangga sangat miskin tetap terjaga ketika berhadapan dengan economic shock, tapi juga diharapkan memberikan ruang lebih leluasa bagi peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Bantuan dana tunai PKH sendiri diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) yang biasa disebut pengurus keluarga karena diyakini dapat mendorong efektifitas PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.

Pemerintah berharap masyarakat merasakan dampak dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). bantuan tunai PKH diharapkan bukan hanya memberikan perbaikan standar hidup secara ekonomi, namun juga secara sosial. PKH membantu keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan yang lebih baik dengan memberikan bantuan pendidikan secara finansial, seperti bantuan biaya sekolah, buku, seragam, dan alat tulis. Selain itu, program ini juga berupaya meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan. Bantuan diberikan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis, akses ke program imunisasi, serta pengelolaan gizi dan kesehatan ibu hamil. Secara keseluruhan, PKH telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga miskin di Indonesia.

Kebijakan redistribusi pendapatan melalui jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah akan menghasilkan perubahan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan kebijakan lainnya. Akan tetapi, signifikansi dari kebijakan ini tergolong lebih rendah dikarenakan dalam pelaksanaannya memerlukan kecermatan dan ketepatan dalam pengalokasian dana agar redistribusi tersebut dapat maksimal. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa pengalokasian dana yang seharusnya tersampaikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga ikut dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Maka dari itu, kebijakan redistribusi pendapatan dalam jaminan sosial dinilai tidak lebih dominan apabila dibandingkan dengan variabel redistribusi pendapatan lainnya.

Dengan hadirnya kebijakan redistribusi pendapatan di Indonesia, tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi pendapatan yaitu sistem pajak tidak efisien yang lebih memberatkan pada individu yang berpendapatan rendah daripada individu yang memiliki pendapatan tinggi. Selain itu, maraknya tindak pidana korupsi yang



menghambat proses redistribusi pendapatan di Indonesia. Apabila sumber daya yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung masyarakat disalahgunakan maka kesenjangan social dan ekonomi di Indonesia akan semakin menjadi-jadi.

Maka dari itu, terdapat rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk kedepannya. Dalam menghadapi sistem pajak tidak efisien, terdapat rekomendasi kebijakan reformasi pajak yang meliputi kajian kembali terkait struktur pajak guna memastikan bahwa beban pajak yang diberikan tersebut adil dan tidak memberatkan sebelah pihak. Selain itu, dalam reformasi pajak dapat dilakukan peningkatan efektivitas pengumpulan pajak guna mengurangi ruang bagi praktik penghindaran pajak. Sedangkan dalam menghadapi tantangan korupsi, dapat dilakukan dengan meningkatkan kebijakan serta langkah-langkah seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dan proses pengadaan sehingga keluar masuknya dana tersebut dapat lebih jelas dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

Seberapa Efektifkah kebijakan Redistribusi Pendapatan

Kebijakan redistribusi pendapatan memang dirancang untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam suatu masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

1. Jenis Kebijakan: Kebijakan yang diterapkan, seperti pajak progresif, transfer tunai, subsidi, atau program bantuan sosial lainnya, memiliki mekanisme dan dampak yang berbeda-beda.
2. Implementasi: Efektivitas kebijakan juga sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Adanya korupsi, birokrasi yang rumit, atau targetting yang tidak tepat dapat mengurangi dampak positif kebijakan.
3. Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan siklus bisnis, dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan redistribusi.
4. Struktur Sosial: Struktur sosial yang ada, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap sumber daya, dan diskriminasi, juga dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
5. Faktor Politik: Kepentingan politik dan tekanan kelompok kepentingan dapat mempengaruhi desain dan implementasi kebijakan redistribusi.

Secara umum, kebijakan redistribusi pendapatan dapat efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan jika:

1. Didesain dengan baik: Kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi spesifik suatu negara dan kelompok masyarakat yang menjadi target.
2. Diimplementasikan dengan baik: Proses implementasi harus transparan, akuntabel, dan efektif
3. Dilaksanakan secara berkelanjutan: Kebijakan redistribusi tidak boleh bersifat sementara, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah.
4. Ditemani dengan kebijakan pelengkap: Kebijakan redistribusi harus diimbangi dengan kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kendala dan Tantangan Meskipun demikian, kebijakan redistribusi pendapatan juga menghadapi beberapa kendala dan tantangan, seperti:

1. Biaya yang tinggi: Kebijakan redistribusi seringkali membutuhkan biaya yang besar dari anggaran negara.
2. Efektivitas jangka panjang: Efektivitas kebijakan redistribusi dalam jangka panjang seringkali sulit



diukur dan dinilai.

3. Perlawanan dari kelompok berpendapatan tinggi: Kebijakan redistribusi seringkali mendapat perlawanan dari kelompok berpendapatan tinggi yang merasa terbebani oleh pajak yang lebih tinggi.

Faktor Kesenjangan

Terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat, yang mencakup berbagai aspek, yaitu:

1. Kondisi Demografi.

Perbedaan jumlah penduduk, komposisi usia, dan persebaran penduduk di berbagai wilayah dapat menciptakan ketidakmerataan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Misalnya, daerah perkotaan yang padat penduduk mungkin memiliki lebih banyak fasilitas, sementara daerah pedesaan seringkali kekurangan.

2. Kondisi Pendidikan

Pendidikan juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan. Kualitas pendidikan yang tidak merata menyebabkan perbedaan kemampuan dan peluang kerja di antara masyarakat. Anak-anak dari keluarga miskin atau daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, sehingga sulit bagi mereka untuk bersaing di pasar kerja.

3. Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan adalah salah satu akibat dari ketidakmerataan. Ketika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, masyarakat lainnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, fluktuasi ekonomi seperti resesi dapat memperburuk situasi ini.

4. Pembangunan Yang Tidak Merata

Pembangunan yang tidak merata juga berkontribusi pada kesenjangan. Infrastruktur yang tidak memadai di daerah tertentu membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, daerah tersebut sulit berkembang dan masyarakatnya terjebak dalam kemiskinan.

5. Kurangnya Lapangan Kerja

Kurangnya lapangan kerja merupakan masalah serius lainnya. Ketika peluang kerja terbatas, tingkat pengangguran meningkat, dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dapat memicu masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan. Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, diperlukan berbagai upaya. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan agar kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi.

Dampak Kesenjangan

Kesehatan, pendidikan, dan stabilitas sosial adalah beberapa aspek kehidupan di mana kesenjangan ekonomi dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Anantaet al., 2024). Akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan adalah salah satu dampak paling mencolok. Karena biaya yang tinggi dan kurangnya fasilitas kesehatan di daerah mereka, masyarakat dalam kelompok ekonomi rendah seringkali tidak dapat mendapatkan perawatan medis yang memadai. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap penyakit dan memiliki harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dalam kelompok ekonomi berpendapatan tinggi. Ketidakadilan ini menghasilkan siklus kemiskinan yang



sulit diputus, di mana kondisi kesehatan yang buruk menghalangi seseorang untuk bekerja dan menghasilkan lebih banyak uang.

Selain itu, kesenjangan ekonomi memengaruhi pendidikan (Edo & Yasin, 2024). Anak-anak yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah seringkali tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas tinggi, yang berdampak pada peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan di kemudian hari. Sumber daya, seperti guru yang berkualitas tinggi dan fasilitas yang memadai, seringkali tidak tersedia di sekolah-sekolah di wilayah yang miskin. Akibatnya, pendidikan yang diterima anak-anak di daerah ini tidak optimal. Mereka yang tidak menerima pendidikan cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan yang samadengan orangtuamereka, meningkatkan ketidaksetaraan di masyarakat.

Meningkatnya ketidakpuasan sosial dan kemungkinan konflik adalah efek tambahan dari kesenjangan ekonomi (Dinartiet al., 2021). Rasa frustrasi dan kemarahan dapat muncul ketika kelompok masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Peningkatan tingkat kriminalitas, protes sosial, dan ketidakstabilan politik adalah semua contoh dari hal ini. Jika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak seimbang, akan sulit untuk membuat lingkungan yang harmonis dan stabil. Akibatnya, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang inklusif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Tantangan Pe- Implementasian Redistribusi Pendapatan Dari Pemerintah

Implementasi kebijakan redistribusi pendapatan dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya sumber daya negara. Anggaran pemerintah seringkali terbatas, sehingga sulit untuk membiayai program-program redistribusi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Selain itu, kompleksitas masalah sosial ekonomi juga menjadi kendala. Kesenjangan ekonomi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasinya.

Kendala lain yang sering ditemui adalah resistensi dari kelompok berpendapatan tinggi. Kelompok ini cenderung tidak menyukai kebijakan yang mengurangi pendapatan mereka, sehingga mereka dapat melakukan lobi atau tindakan lain untuk menghambat pelaksanaan kebijakan redistribusi. Efisiensi dan efektivitas program juga menjadi sorotan. Program-program redistribusi harus dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efisien agar dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi yang dinamis juga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan redistribusi. Misalnya, krisis ekonomi dapat mengurangi pendapatan negara dan membatasi ruang gerak pemerintah dalam melaksanakan program-program redistribusi. dan Mengukur efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan juga merupakan tantangan tersendiri. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan seringkali bersifat kompleks dan sulit untuk diukur secara akurat. Selain itu, efek jangka panjang dari kebijakan redistribusi sulit untuk diprediksi dan diukur.

Rekomendasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Efektivitas Redistribusi Pendapatan

Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan redistribusi merupakan langkah krusial dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain, implementasi, dan konteks sosial ekonomi yang spesifik. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas redistribusi pendapatan:

1. Peningkatan Targetedness dan Akurasi Program

Salah satu kunci keberhasilan program redistribusi adalah kemampuan untuk menargetkan bantuan



kepada kelompok yang paling membutuhkan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan peningkatan kualitas data penerima manfaat melalui basis data yang terintegrasi dan sistem verifikasi yang ketat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti big data dan artificial intelligence dapat membantu mengidentifikasi kelompok yang rentan dan mengoptimalkan penyaluran bantuan.

2. Perluasan Cakupan dan Diversifikasi Program

Program redistribusi perlu terus diperluas cakupannya untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, diversifikasi jenis bantuan juga penting, tidak hanya berupa transfer tunai tetapi juga dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

3. Penguatan Sistem Pajak Progresif

Pajak progresif merupakan instrumen penting dalam meredistribusikan pendapatan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan upaya untuk memperluas basis pajak, meningkatkan tarif pajak bagi kelompok berpendapatan tinggi, dan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem perpajakan untuk menghilangkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penghindaran pajak.

4. Investasi dalam Sumber Daya Manusia

Investasi dalam sumber daya manusia merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, dan layanan kesehatan.

5. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Akuntabilitas

Reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program redistribusi. Sederhana birokrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

6. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah sangat penting untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program redistribusi. Pembentukan satu pintu layanan untuk mengakses berbagai program bantuan sosial dapat mempermudah masyarakat dan meningkatkan efisiensi.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam upaya pemerintah dalam meredistribusi pendapatan nasional guna mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin menggurita di masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap data [sebutkan sumber data] dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan redistribusi pendapatan yang telah diterapkan sejauh ini memberikan kontribusi positif dalam mengurangi ketimpangan. Program-program seperti [sebutkan contoh program, misalnya: Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, subsidi energi] telah berhasil meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di kelompok berpendapatan rendah.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dan kendala yang menghambat efektivitas kebijakan redistribusi. Misalnya: terbatasnya sumber daya, kompleksitas masalah sosial ekonomi, resistensi dari kelompok berpendapatan tinggi, kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ariadi, V. N. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. *jurnla ilmu ekonomi pembangunan*, 485-499.
- Arsyad. (2017). *ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP SYIM YKPN
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 5(1), 1.
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 9(1), 232–248
- Bustamam, N., Yulyanti, S., & Dewi, K. dalam *Penganggaran: Strategi dan Rekomendasi Kebijakan. Peradaban*
- Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533>.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(3), 317-326.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243-258.
- Hartati, E. S., Listiyanto, E., Pulungan, A. M., Adhinegara, B. Y., Firdaus, A. H., Abdulah, R., ... & Huda, N. (2020). Kajian Tengah Tahun INDEF 2017: Mengurai Solusi Ketimpangan. *INDEF. Journal of Law and Society*, 3(1), 48- 62.
- KESEJAHTERAAN DI Pendahuluan Penelitian Terdahulu.” 4(1):1–8.
- Maulana, F. *Ekonomi Kesehatan: Permintaan Dan Penawaran Dalam Sektor Layanan Kesehatan*.
- Ningrum, E. P., Sumarno, M., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 116-
- Nurakhmadi, D. A., Rahmawan, T. I., & Suhendro, S. (2024). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat
- PEMBANGUNAN JALUR LUAR LINGKAR BARAT DI KOTA**
- Penelitian, Abstrak. 2024. “ANALISIS KEBIJAKAN REDISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PERUBAHAN SOSIAL- EKONOMI: STUDI KASUS
- S. (2021). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi KIAMAT*, 32(1).
- Silvy, F. A., Sukristyanto, A., & Basyar, M. R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EMBEBASAN LAHAN UNTUK SURABAYA. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(05), 166-178.